

PB RTA Kecam BSI, Anggap Telah Ikut Merusak Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Category: Aceh, News

written by Maulya | 11/02/2025



ORINEWS.id – Pengurus Besar Rabithah Thaliban Aceh (PB RTA) melalui Sekjendnya, Tgk. Faisal Kuba mengecam buruknya pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang telah memunculkan banyak kemudharatan terhadap masyarakat Aceh.

Layanan [BSI](#) melalui aplikasi *Byond* sedang mengalami gangguan. Gangguan tersebut dianggap telah merugikan nasabah BSI yang terkendala dalam pelaksanaan transaksi keuangan sehari-hari. Hal ini disampaikan Tgk. Faisal Kuba, Selasa (11/2), di Banda Aceh.

Terkait gangguan layanan BSI, Faisal menganggap bahwa BSI tidak memiliki komitmen serius dalam memberikan layanan berkualitas. Buruknya layanan BSI dapat berdampak terhadap citra pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

“BSI merupakan bank milik pemerintah yang paling dominan di Aceh. Punya cabang hingga ke kecamatan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh bank lain. Jadi 99% masyarakat Aceh tiap hari bertransaksi dengan layanan BSI. Gangguan layanan ini sangat merugikan masyarakat. Buruknya layanan BSI telah membuat citra syariat Islam menjadi negatif, BSI harus bertanggung jawab” ujar Faisal.

PB RTA ini juga meminta agar DPRA segera memanggil dan menegur jajaran pimpinan kantor wilayah BSI Aceh atas masalah ini.

“Pihak DPRA perlu memanggil pimpinan wilayah BSI Aceh atas kerugian yang dialami masyarakat. Pihak BSI harus menjelaskan persoalan ini kepada DPRA,” terangnya.

Dengan gangguan layanan BSI ini, PB RTA juga melihat bahwa sudah saatnya Qanun LKS untuk direvisi, yang dapat memihak masyarakat dan menghadirkan kontruksi hukum perbankan yang lebih komprehensif serta dapat menjamin kemaslahatan. Selama ini bank syariah terbesar nasional, BSI, justru kinerja dan layanannya buruk dan seringkali bermasalah.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera merevisi Qanun LKS. Beginilah jika BSI menjadi kekuatan perbankan yang hegemonik di Aceh, bisa semena-mena dalam pelayanan. Kebijakan ini telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Aceh yang bergantung pada BSI, padahal kinerja dan layanan BSI terbilang buruk dan telah menyalahi nilai-nilai Syariah,” tutup Tgk. Faisal Kuba.